

# HARMONISASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PERMENDES PDPT

## HARMONISASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PERMENDES PDPT NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

**ARY WIDY HARTONO**  
**201710380211008**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Selasa, 29 September 2020

Pembimbing Utama

Mokh. Najih., SH, MH, Ph.D

Pembimbing Pendamping

Dr. Fifik Wiryani, SH, M.Si, M.Hum

Direktur  
Program Pascasarjana

Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Mokh. Najih., SH, MH, Ph.D

**HARMONISASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN  
PERMENDES PDTT NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019**

**ARY WIDY HARTONO  
201710380211008**

Telah disetujui  
Pada hari/tanggal, Selasa, 29 September 2020

Pembimbing Utama

  
**Mokh. Najih., SH, MH, Ph.D**

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Fifik Wiryani, SH, M.Si, M.Hum**

  
Direktur  
Program Pascasarjana

  
**Prof. Akhsanul In'am, Ph.D**

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

  
**Mokh. Najih., SH, MH, Ph.D**

# **TESIS**

**Dipersiapkan dan Disusun Oleh :**

**ARY WIDY HARTONO**

**201710380211008**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada hari/tanggal, 29 September 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

## **SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Ketua / Penguji : Mokh Najih, PhD**

**Sekretaris / Penguji : Dr. Fifik Wiryani**

**Penguji I : Dr. Herwastoeti**

**Penguji II : Dr. Haris Tofly**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ARY WIDY HARTONO**  
NIM : **201710380211008**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

1. TESIS dengan judul : **“HARMONISASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PERMENDES PDPT NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019”** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 September 2020  
Yang menyatakan,



**ARY WIDY HARTONO**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala Puji yang senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini tanpa ada batasnya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah zaman kegelapan menuju jaman terang benderang.

Dengan Ridla Allah SWT yang telah memberikan Hidayah-Nya berupa Iman, Islam serta keikhlasan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan hukum (tesis) ini dengan baik dan lancar, dengan judul **“HARMONISASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PERMENDES PDPT NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019”** yang merupakan Tugas Akhir studi di Magister Ilmu Hukum, Direktorat Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang.

Begitu banyak dukungan baik secara moril maupun materiil dari keluarga, saudara, rekan satu angkatan, pembimbing dan berbagai pihak terkait, tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis. Berbagai macam hambatan dan godaan yang dihadapi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Rasa optimisme dan percaya diri yang menjadi motivasi oleh penulis untuk tetap fokus dalam menyelesaikan tesis sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis sudah sepatutnya menyampaikan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menyelesaikan perkuliahan hingga terselesaikannya Tugas Akhir;.
2. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Mokh. Najih, Ph.D., selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan sekaligus sebagai pembimbing pengganti;
5. Bapak Almarhum Dr. Sulardi, SH, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I, yang sangat memberikan motivasi dan dorongan hingga terselesaikannya tesis ini;
6. Ibu Dr. Fifik Wiryani, SH, M.Si, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
7. Ibu Dr. Herwastoeti, SH, M.Hum, Selaku Dosen Penguji I yang secara maksimal dan professional di dalam menguji Tugas Akhir (Tesis) dengan baik;
8. Bapak Dr. Haris Tofly, SH, M.Hum, selaku dosen Penguji II yang secara maksimal dan professional di dalam menguji Tugas Akhir (Tesis) dengan baik;
9. Keluarga Besar Bapak H. Soewardi (Alm) yaitu Ibu Hj. Sriwiningsih, Kel. Hj. Endang Sriwahyunani, Kel. H. Gatot Wahyudianto, Kel. Dedik Efendi, Kel. Anik Widyastutik, Kel. Titik Andayani, Kel. Dini Windrayani dan Kel. Wiwik Widyawati, yang telah memberikan doa dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
10. Istri tercinta Ibu Jeky Herawati dan ananda tercinta Rykyfirsta Shafa Devoutra, Rykale Syadza Deva dan Rytsalasa Sangqueen Dainty;
11. Kepala Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, beserta Perangkat Desa dan Staf;
12. Kepala Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, beserta Perangkat Desa dan Staf;
13. Kepala Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, beserta Perangkat Desa dan Staf;
14. Kepala Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, beserta Perangkat Desa dan Staf;
15. Kepala Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, beserta Perangkat Desa dan Staf;
16. Kepala Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, beserta Perangkat Desa dan Staf;
17. Kepala Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, beserta Perangkat Desa dan Staf;

18. Kepala Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, beserta Perangkat Desa dan Staf;
19. Kepala Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, beserta Perangkat Desa dan Staf;
20. Kepala Desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, beserta Perangkat Desa dan Staf;
21. Rekan saya delapan orang anggota Majelis BPSK Kota Malang Periode tahun 2016 s/d 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
22. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya Angkatan Tahun 2017;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dengan beribu-ribu kasih sayangnnya atas dukungan, kebaikan, pengorbanan, perjuangan, keikhlasan dan kesabarannya. Penulisan hukum ini sudah dilakukan dengan pengkajian secara ilmiah dan dibimbing oleh pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Besar harapannya untuk diberikan saran dan masukan untuk kebaikan bersama. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat. Aamiin.

*Billahitaufiqwalhidayah.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Malang, 29 September 2020

**ARY WIDY HARTONO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
 <b>PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	3
Tujuan Penelitian.....	4
Kegunaan Penelitian.....	4
 <b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>	 <b>5</b>
Penelitian Terdahulu.....	5
Asas-asas pengelolaan keuangan desa.....	7
Teknik Pengumpulan Data.....	9
Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
 <b>METODE PENELITIAN.....</b>	 <b>10</b>
Jenis Penelitian.....	10
Pendekatan Penelitian.....	11
Obyek Penelitian.....	11
Jenis Bahan Hukum.....	12
Bahan Hukum Primer.....	12
Bahan Hukum Sekunder.....	13
 <b>PEMBAHASAN.....</b>	 <b>13</b>
Bentuk Disharmoni.....	13
Implementasi.....	15
Implikasi.....	25
Formula Ideal Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20/2018 dengan Permendes PDTT Nomor 16/2018.....	26
 <b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	 <b>27</b>
Kesimpulan.....	27
Saran.....	27
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>28</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu.....	5
Tabel 2 : Perbedaan Pemendagri 20/2018 Dengan Permendes PDTT 16/2018.....	13
Tabel 3 : Nama Desa dan Kategori Desa.....	26

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Desa Donowarih Kecamatan Karangploso .....	16
Gambar 2 : Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso .....	17
Gambar 3 : Desa Ngijo Kecamatan Karangploso .....	18
Gambar 4 : Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso .....	19
Gambar 5 : Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso .....	20
Gambar 6 : Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso .....	21
Gambar 7 : Desa Bocek, Kecamatan Karangploso .....	22
Gambar 8 : Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso .....	23
Gambar 9 : Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso.....	24
Gambar 10 : Desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang.....	25

## ABSTRAK

**ARY WIDY HARTONO**  
[awidyhartono@gmail.com](mailto:awidyhartono@gmail.com)

**Mokh. Najih,SH, M.Hum, PhD (NIDN 0017056501)**  
**Dr. Fifik Wiryani, SH, M.Si, M.Hum (NIDN 0028056701)**

Pengelolaan keuangan desa terdapat di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDESA), APBDESA terdiri dari Pendapatan Desa dan Belanja Desa. Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber dana yaitu : 1. Pendapatan Asli Desa (PAD), 2. Alokasi Dana Desa (ADD), 3. Dana Desa (DD), 4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi, 5. Bantuan Keuangan Propinsi/Kabupaten. Belanja Desa terdiri dari : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 2. Bidang Pembangunan Desa, 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, 5. Bidang Tak Terduga, Terdapat ketidak harmonisan Permendagri 20/2018 dengan Permendes PDTT 16/2018 dalam hal belanja Pembangunan Kantor/Balai Desa yang bersumber dari Dana Desa. Hal itu terdapat dalam Lampiran Permendagri 2.3.06. Pemeliharaan Gedung/prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan dengan Permendes PDTT 16/2018 Pasal 4 ayat 1 berbunyi : Penggunaan Dana Desa Diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDESA), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, Dana Desa (DD)

## ABSTRACT

**ARY WIDY HARTONO**

**[awidyhartono@gmail.com](mailto:awidyhartono@gmail.com)**

**Mokh. Najih,SH, M.Hum, PhD NIDN 0017056501**

**Dr. Fifik Wiryani, SH, M.Si, M.Hum NIDN 0028056701**

The financial management of the village is contained in the Village Expenditure Revenue Budget (APBDESA), the BUDGET consists of Village Income and Village Expenditure. Village income comes from several sources of funds namely: 1. the village's original income, 2. Village Fund Allocation, 3. Village Fund, 4. Income Share Tax/Levy, 5. Provincial/District Financial Assistance. Village Expenditure consists of: 1. The Field of Organizing Village Government, 2. Field of Village Development, 3. Field of Village Community Development, 4. Field of Village Community Empowerment, 5. Unexpected Field, There is a disharmony of Permendagri 20/2018 with Permendes PDTT 16/2018 in terms of spending on Building Offices / Village Halls sourced from village funds. It is contained in Appendix Permendagri 2.3.06. Maintenance of Building/Infrastructure of Village Hall/Community Hall with Permendes PDTT 16/2018 Article 4 paragraph 1 reads: The use of village funds is prioritized to finance the implementation of programs and activities in the field of Village Development and Village Community Empowerment

Keywords :

Village Expenditure income budget, regulation of the Minister of the Interior number 20 year 2018, regulation of the Minister of Rural Development disadvantaged and transmigration No. 16 year 2018, Dana Village.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah menyalurkan Dana Desa (DD) pertama kali digelontorkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 20,67 Triliun, selanjutnya tahun 2016 sebesar 46,98 Triliun, Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar 60 Triliun. Namun, kucuran dana tersebut belum maksimal mengatasi masalah 74.957 desa yang ada di Indonesia. Hal itu terbukti, masih terdapat 10.000 desa yang tidak memiliki Kantor Desa di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB, Sofyan Sjaf mengatakan, Dana Desa (DD) yang mengalir selama ini tidak diperbolehkan untuk membangun kantor/balai desa, yang harus diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan fasilitas kantor desa tersebut. Apakah pemerintah daerah yang dialokasikan dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau bisa mempertimbangkan Dana Desa (DD).<sup>1</sup>

Prof Dr Jimly Asshiddiqie <sup>2</sup> berpendapat bahwa keberadaan desa sebagai “*self governing community*” bersifat otonom atau mandiri. Oleh karena secara struktur pemerintahan di Negara kita hanya sampai pada tingkat kecamatan, sedangkan di bawah kecamatan dianggap sebagai wilayah otonom yang diserahkan pengaturan dan pembinaannya kepada dinamika yang hidup dalam masyarakat itu sendiri secara otonom. Hal ini telah dikukuhkan pula dalam perubahan UUD 1945 yang memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup>JawaPosKamis, 15 Nopember 2018, RibuanDesaTakPunya Kantor, KadesTakutPakai ADD.

<sup>2</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia,

Pasal 7 ayat 3, butir c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.<sup>3</sup> Hal tersebut dapat dikaitkan dengan betapa pentingnya pembangunan kantor/Balai Desa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik apabila masih terdapat 10.000 desa di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang belum memiliki fasilitas kantor/balai desa. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas pelayanan public apabila kantor yang dijadikan media pelayanan saja masih belum ada.

Dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan ***“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa”***. Maka hasil dari musyawarah tersebut merupakan keputusan tertinggi di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang salah satu bagiannya adalah Pembangunan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal desa didanai oleh APBDDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDDesa juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian / lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa (RKD) dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDDesa.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk : 1) Mengetahui Bentuk disharmoni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018, dikaitkan dengan belanja desa untuk Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan; 2) Mengetahui Implementasi dua peraturan menteri terhadap pelayanan masyarakat apabila dikaitkan dengan keberadaan kantor/balai desa, 3). Mengetahui Implikasi Hukum terhadap pelayanan masyarakat bagi desa yang belum memiliki kantor/Balai Desa, 4). Mengetahui formulasi ideal antara Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018. Penelitian ini diperoleh dari sumber data yang berasal dari hasil penggabungan data yang terkait satu sama lain, buku-buku, karya ilmiah artikel serta sumber yang berasal dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada 10 Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengelolaan keuangan desa sejak tahun 2015, khususnya dalam hal belanja Dana Desa (DD) tidak pernah belanja Dana Desa (DD) untuk pembangunan Balai Desa. Hal itu tidak dikatakan secara tegas berbunyi di dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018. Maka penulis memberi judul penelitian ini yaitu **:"Harmonisasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019"**.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk disharmoni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018, dikaitkan dengan belanja desa untuk pemeliharaan gedung/prasarana Balai Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) ?
2. Bagaimanakah Implementasi dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 ?
3. Bagaimanakah Implikasi yang terjadi apabila terjadi disharmonisasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 ?



4. Bagaimana formula ideal Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018, agar belanja pemeliharaan gedung/prasarana Balai Desa bisa dibelanjakan menggunakan Dana Desa (DD) ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk disharmoni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018, dikaitkan dengan pemeliharaan gedung / prasarana balai desa / balai kemasyarakatan;
2. Untuk mengetahui formula ideal Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018, mengingat tidak secara tegas dalam Permendes PDTT Nomor 16 dikatakan pembangunan / renovasi/peningkatan gedung/prasarana kantor.

### **Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal menambah wawasan untuk kalangan penyelenggara negara, khususnya buat Pemerintah Desa yang berkaitan langsung dengan belanja desa, khususnya belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD) sekaligus bagi kalangan mahasiswa / akademisi / pendidik dalam menambah wawasan ilmu, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, berupa konsep pemikiran dan pemahaman kepada Perangkat Desa didalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, khususnya dalam hal belanja Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dibelanjakan untuk Pembangunan/Renovasi Balai Desa agar tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

## KAJIAN PUSTAKA

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Inten Meutia Liliana, Universitas Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Bukit Lama, Ilir Bar. I, Palembang 30139	Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dengan menggunakan data primer dari para pengambil keputusan di 26 desa	Penelitian tentang Dana Desa	Meneliti tentang pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) khusus untuk Belanja Pembangunan
2	Lina Nasehatun Nafidah1, Nur Anisa21,2,STIE PGRI Dewantara Jombang	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 10 (2), Oktober 2017, P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190, Page 273 – 288,	Masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, agar pengelolaan Keuangan Desa bisa tercapai akuntabilitasnya.	Penelitian tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan undang-undang desa nomor 6 Tahun 2014	Meneliti tentang pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) khusus untuk Belanja Pembangunan

		<a href="http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas">http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas</a> 273, DOI:10.15408/akt.v10i2.5936			
3	Hasniati, Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin hasniati@unhas.ac.id	Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2, Nomor 1, Juni 2016, pISSN: 2460-6162, eISSN: 2527-6476, Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	mengembangkan sebuah model akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Pemerintah Desa agar penggunaan dana desa bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder)	Penelitian tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan undang-undang desa nomor 6 Tahun 2014	Meneliti tentang pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) khusus untuk Belanja Pembangunan
4	Tegar Firmandani, Tegarfirmandani@gmail.Com Tlpn 085272657037	Tinjauan Yuridis Kedudukan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Kedudukan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bentuk ideal pengaturan keuangan desa Berdasarkan Peraturan	Penelitian tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan undang-undang desa nomor 6 Tahun 2014	Meneliti tentang pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) khusus untuk Belanja Pembangunan

			Perundang-Undangan		
--	--	--	--------------------	--	--

### **Asas-asas pengelolaan keuangan desa :**

#### **a. Asas Pancasila**

Yaitu sumber dari segala sumber hukum, setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan bila terjadi pertentangan, maka peraturan tersebut harus segera dicabut atau direvisi

#### **b. Asas Kedaulatan Rakyat**

Yaitu Rakyat memiliki wewenang yang tertinggi di dalam menentukan segala wewenang dalam negara kedaulatan rakyat yang dalam hal implementasinya diwakilkan kepada MPR, kekuasaan majelis itu nyata dan ditentukan oleh UUD tapi oleh karena majelis merupakan sebuah badan yang besar, maka ia menyerahkan lagi kepada badan-badan yang ada dibawahnya.

#### **c. Asas Negara Hukum**

Yang dimaksud dengan asas Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga Negaranya. Keadilan adalah syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan perlu di ajarkan rasa susila pada setiap manusia supaya dia menjadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada bila peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

#### **d. Asas Negara Kesatuan**

Salah satu cara untuk menjaga keutuhan negara ini yakni dengan membentuk hukum tata negara yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Terandung dalam UUD 1945, pasal 1 ayat (1) sudah ditegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk republik.

#### **e. Asas Transparan**

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa

**f. Asas Akuntabel**

1. Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan pemerintahan desa
2. Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban;
3. Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

**g. Asas Partisipatif**

1. Yaitu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tidak hanya tanggung jawab pemerintah desa semata, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Adapun tugas masyarakat mengawasi pengelolaan keuangan desa secara aktif
2. bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

3. Sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

#### **h. Tertib dan disiplin anggaran**

1. Yaitu dalam pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan-perundangan. Pengelolaan keuangan juga dilakukan secara berkelanjutan;
2. Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang benar-benar berkualitas.

#### **a. *Studi Pustaka***

Peneliti ini juga melakukan pencarian data melalui sumber-sumber tertulis untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian ini. Menurut penjelasan Rosady Ruslan, Studi pustaka merupakan :

“Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan materi data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan”.<sup>4</sup>

#### **b. *Studi Literatur***

Dalam studi literatur ini penulis menganut sistem perpustakaan terbuka dimana

---

<sup>4</sup> Rosady Ruslan Metode penelitian public relations dan komunikasi 2003:21



dengan mengumpulkan data atau keterangan melalui bahan bacaan mengenai masalah-masalah yang diteliti seperti Koran, Buku-buku, jurnal-jurnal, tesis.

*c. Penelusuran Data Online*

Penelusuran Data Online merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi informasi yang berupa alat / mesin pencari di internet dimana segala informasi dari berbagai sumber tersedia didalamnya.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka. Bahan hukum primer yang diperoleh dari turun lapangan, wawancara dan penggalan keterangan di obyek penelitian. Dari hasil bahan hukum penelitian ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri dengan membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif artinya, menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya, analisa dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendiskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-

alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, artinya bahwa penelitian ini merujuk dari suatu fenomena yang terjadi dalam suatu desa, khususnya penyelenggaraan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) khusus untuk belanja pembangunan. Cara yang dilakukan dengan turun ke lapangan sekaligus melakukan wawancara langsung dengan sumber informasi yaitu terhadap 9 (Sembilan) Desa yang terdapat di Kecamatan Karangploso dan 1 (satu) desa yang terdapat di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kasus yaitu penelitian yang secara langsung menganalisa kasus yang dialami oleh 10 Desa di 2 Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 3 (tiga) macam kategori yang berbeda diantaranya yaitu :

1. Desa yang memiliki Kantor Desa;
2. Desa yang memiliki Balai Desa; dan
3. Desa yang memiliki Balai Pertemuan/Gedung Serba Guna.

### **Obyek Penelitian**

1. Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
2. Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
3. Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
4. Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

5. Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
6. Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
7. Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
8. Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
9. Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
10. Desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.

## **Jenis Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Menteri PDPTT Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
4. Peraturan Desa (Perdes) Nomor 6 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDESA-P) Desa Donowarih Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Desa (Perdes) Nomor 10 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDESA-P) Desa Kepuharjo Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Desa (Perdes) Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Ngijo Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Girimoyo Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Desa (Perdes) Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Ngenep Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Desa (Perdes) Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Ngenep Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Desa (Perdes) Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Bocek Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Ampeldento Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Tegalgondo Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Sudimoro Tahun Anggaran 2019;

#### **Bahan Hukum Sekunder**

Data yang diperoleh dari studi pustaka berupa jurnal-jurnal, buku-buku, makalah, atau sumber lain yang berhubungan dengan penulisan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain :

1. Inten Meutia Liliana , Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Ilir Bar, I, Palembang 30139
2. Lina Nasehatun Nafidah<sup>1</sup>, Nur Anisa<sup>2,1,2</sup>, STIE PGRI Dewantara Jombang
3. Hasniati, Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin [hasniati@unhas.ac.id](mailto:hasniati@unhas.ac.id)
4. Tegar Firmandani, [Tegarfirmandani@Gmail.Com](mailto:Tegarfirmandani@Gmail.Com)–Tlpn 085272657037

#### **PEMBAHASAN**

##### **BENTUK DISHARMONI**

Bentuk Disharmoni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 bisa dilihat dalam tabel di bawah ini :

**TABEL 2**

##### **Perbedaan Pemendagri 20/2018 Dengan Permendes PDTT 16/2018**

Permendagri No. 20 Tahun 2018	Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018
Pasal 17 ayat (2) huruf c pekerjaan	Pasal 5

<p>umum dan penataan ruang</p> <p>2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>2.3.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</p>	<p>1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.</p> <p>2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: lingkungan pemukiman;</p> <p>1. transportasi;</p> <p>2. energi; dan</p> <p>3. informasi dan komunikasi.</p> <p>b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:</p> <p>1. kesehatan masyarakat; dan</p> <p>2. pendidikan dan kebudayaan.</p> <p>c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:</p> <p>1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan; usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p>
---	---

## IMPLEMENTASI

Implementasi Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 terdapat dalam belanja pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 di Kecamatan Karangploso, meliputi 9 (Sembilan Desa), dan di Kecamatan Bululawang 1 (satu) desa yang terdiri dari :

- a. Belanja Pembangunan Desa Donowarih Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu :<sup>5</sup>

1. Aspal Jalan Desa Dusun Borogragal	9. Paving Jalan RT 27 dan RT 28, Dusun Karangjuwet
2. Paving Jalan RT 08, Dusun Karang	10. TPT RT 41, Dusun Borogragal
3. Paving Jalan RT 09 dan RT 10, Dusun Karang	11. TPT RT 44, Dusun Borogragal
4. Paving Jalan RT 19, Dusun Jaraan	12. TPT RT 45, Dusun Borogragal
5. Paving Jalan RT 20, Dusun Jaraan	13. Drainase + Tutup Cor RT 09 dan RT 10, Dusun Karang
6. Paving Jalan RT 22, Dusun Jaraan	14. Drainase + Tutup Cor RT 20, Dusun Jaraan
7. Paving Jalan RT 27, Dusun Karangjuwet	15. Drainase + Tutup Cor RT 23, Dusun Jaraan
8. Paving Jalan RT 29, Dusun Karangjuwet	16. Drainase + Tutup Cor RT 27, Dusun Karangjuwet
	17. Drainase + Tutup Cor RT 38, Dusun Karangjuwet

<sup>5</sup> Peraturan Desa (Perdes) Nomor 6 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBDESA-P) Desa Donowarih Tahun Anggaran 2019





Kantor Desa Donowarih

Memiliki Kantor Desa dan Balai Desa

**b. Belanja Pembangunan Desa Kepuharjo Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana**

Desa (DD) yaitu :<sup>6</sup>

1. Pavingisasi Jalan Kampung
2. Rabat Bahu Jalan Dusun Turi Menuju Kelurahan Tasikmadu
3. Drainase Dusun Tlasi
4. Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun Kepuh Selatan
5. Rabat bahu Jalan Dusun Tlasi
6. Rehab Jembatan Dusun Karangploso Wetan
7. Pavingisasi
8. Drainase
9. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Desa Kepuharjo

---

<sup>6</sup> Peraturan Desa (Perdes) Nomor 10 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBDESA-P) Desa Kepuharjo Tahun Anggaran 2019



### Desa Kepuharjo

Memiliki Kantor Desa, Balai Desa dan Balai Pertemuan/Gedung Serbaguna

c. Belanja Pembangunan Desa Ngijo Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu :<sup>7</sup>

1. Drainase RW 01
2. Pavingisasi RW 01
3. Pembangunan Balai RW 02
4. Pembangunan Drainase RW 02
5. Pembangunan Pavingisasi RW 02
6. Pembangunan Drainase RW 03
7. Pembangunan Gorong-gorong RW 04
8. Pembangunan Pavingisasi RW 04
9. Pembangunan Drainase RW 05
10. Pembangunan Saluran Irigasi RW 05
11. Pembangunan Balai RW 06
12. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RW 07
13. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPST) RW 08
14. Pembangunan Pavingisasi RW 09

<sup>7</sup> Peraturan Desa (Perdes) Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngijo Tahun Anggaran 2019

15. Pembangunan Balai RW 10
16. Pembangunan Balai RW 11
17. Pembangunan Pavingisasi RW 12
18. Pengadaan Bak Dump Sampah Perumahan Griya Permata Alam



Desa Ngijo

Memiliki Kantor Desa dan Balai Desa

- d. Belanja Pembangunan Desa Girimoyo Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu :<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimoyo Tahun Anggaran 2019



1. Jalan Hotmix
2. Pemeliharaan Drainase RT 12 Dusun Karangploso
3. Pemeliharaan Gapura Jalan Desa
4. Rehabilitasi Pos Kamling
5. Rehabilitasi Hanggar TPST 3R



#### Desa Girimoyo

Memiliki Kantor Desa dan Balai Pertemuan/Gedung Serbaguna

- e. Belanja Pembangunan Desa Ngenep Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu :<sup>9</sup>

1. Aspal Jalan Dusun Babaan-curah kembang-kubung
2. Pavingisasi Dusun Tumpangrejo
3. Pavingisasi Ngenep Barat
4. Pavingisasi Makam Ngenep
5. Pavingisasi Ngenep Utara
6. Pavingisasi RW 12
7. Pavingisasi Mbah Mangunjoyo
8. Pavingisasi Lowoksari
9. Jalan Rabat Beton Genitri
10. Pavingisasi Curah Kembang

<sup>9</sup> Peraturan Desa (Perdes) Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngenep Tahun Anggaran 2019

11. Drainase RT 04, RW 2
12. Drainase RT 6, RW 1
13. Plengsengan Babaan
14. Drainase RT 4, RW 8
15. TPT Tandon Curahkembang
16. TPT Kubung
17. TPT Sentono Mojosari



Desa Ngenep

Memiliki Kantor Desa dan Balai Pertemuan/Gedung Serbaguna

f. Belanja Pembangunan Desa Tawangargo Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu :<sup>10</sup>

1. TPT Pagar TK Desa Tawangargo
2. Lantai, Atap dan Pagar Besi Puskesmas Pembantu
3. Pavingisasi RT 28
4. TPT RT 29
5. Gorong-Gorong Dusun Ngudi RT 29
6. Gorong-Gorong Dusun Ngudi RT 29
7. Pengecoran Jalan Lingkungan Dusun Ngudi

<sup>10</sup> Peraturan Desa (Perdes) Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tawangargo Tahun Anggaran 2019

8. Pengecoran Jalan Lingkungan Dusun Kalimalang
9. Pengecoran Jalan Lingkungan Dusun Lasah
10. Pengecoran Jalan Lingkungan Dusun Kalimalang
11. Pavingisasi Jalan Lingkungan Dusun Leban RT 17
12. Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun Kalimalang
13. Pengecoran Jalan Lingkungan Dusun Kalimalang RT 15
14. Pengecoran Jalan Lingkungan Dusun Leban RT 27
15. Pengecoran Jalan Lingkungan Dusun Kalimalang RT 6
16. Pengecoran Jalan Lingkungan Dusun Kalimalang RT 6
17. Pengecoran Jalan Lingkungan Dusun Leban RT 24
18. TPT Dusun Kalimalang
19. TPT Dusun Lasah
20. TPT Dusun Ngudi
21. TPT Makam Leban
22. Plat Dueker
23. TPT Dusun Leban
24. Plat Dueker Masjid Ngudi
25. Balai Dusun Boro
26. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 3 Unit di Boro
27. Air Bersih Dusun Suwaluhan
28. Tempat Pengolahan Sampah Dusun Ngudi
29. Tempat Pengolahan Sampah Dusun Kalimalang
30. Tempat Pengolahan Sampah Dusun Lasah





## Desa Tawangargo

Memiliki Kantor Desa dan Balai Desa

g. Belanja Pembangunan Desa Bocek Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu :<sup>11</sup>

1. Rabat Beton Bocek Krajan RT 2, RW 3
2. Rabat Beton Bocek Krajan RT 3, RW 5
3. Rabat Beton Bocek Krajan RT 4, RW 5
4. Rabat Beton Bocek Krajan RT 8, RW 1
5. Rabat Beton Bocek Krajan RT 4, RW 3
6. Rabat Beton Manggisari, RT 2, RW 6
7. Rabat Beton Manggisari RT 3, RW 6
8. Rabat Beton Jalan Makam Manggisari
9. Rabat Beton Manggisari RT 2, RW 6
10. Rabat Beton Manggisari RT 4, RW 6
11. Rabat Beton Manggisari RT 1, RW 8
12. Rabat Beton Supiturang
13. Drainase Bocek Krajan, RT 4, RT 5
14. Drainase Supiturang, RT 1, RT 9

<sup>11</sup> Peraturan Desa (Perdes) Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bocek Tahun Anggaran 2019



Desa Bocek

Memiliki Kantor Desa dan Balai Pertemuan/Gedung Serbaguna.

**h.** Belanja Pembangunan Desa Ampeldento Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu :<sup>12</sup>

1. TPT Pondok Genteng
2. Pavingisasi RT 13
3. Pavingisasi RT 26 (lapangan)
4. Drainase Beton Bis
5. Pavingisasi RT 01
6. Tembok Penahan Tanah(TPT) RW 10
7. Pavingisasi RT 07
8. Pavingisasi RT 04
9. Pavingisasi RT 29 (Supini)
10. Pavingisasi RT 29 (Slamet)
11. Perluasan Jembatan Beton RT 28

<sup>12</sup> Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ampeldento Tahun Anggaran 2019

12. Gapura Batas Desa
13. TPT Makam Dusun Bunder
14. Drainase Sebelah Makam Bunder
15. Rehab Cagar Budaya Rogo Boyo Tahap 2



Desa Ampeldento

Memiliki Kantor Desa dan Balai Desa

- i. Belanja Pembangunan Desa Tegalondo Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu : <sup>13</sup>
  1. Jalan Paving Dusun Gondang
  2. Drainase Dusun Ketangi
  3. Jalan Paving Dusun Wunutsari
  4. Jalan Paving Dusun Ketangi
  5. Jalan Paving Dusun Wunutsari
  6. Jalan Paving Dusun Babatan
  7. Drainase Dusun Babatan
  8. Sudetan Dusun Wunutsari

<sup>13</sup> Peraturan Desa (Perdes) Nomo 3 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalondo Tahun Anggaran 2019



9. Rumah Tidak Layak Huni (2 Unit)

10. Pasar Wisata Desa

11. Gedung Olah Raga (GOR)



Desa Tegalgondo

Memiliki Kantor Desa dan Balai Desa

j. Belanja Pembangunan Desa Sudimoro Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu :<sup>14</sup>

1. Aspal Hotmix
2. Drainase RT 11
3. Drainase RT 21
4. Rabat Beton RT 01
5. Rabat Beton RT 08
6. Terfod Jalan RT 02
7. Terfod Jalan Makam
8. Renovasi Gapura
9. Plat Deker RT 25
10. Pelebaran Jalan / Rabat Beton



<sup>14</sup> Peraturan Desa (Perdes) Nomor, 3 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sudimoro Tahun Anggaran 2019

11. Bedah Rumah Krajan
12. Bedah Rumah Timur
13. Bedah Rumah Selatan

Desa Sudimoro

Memiliki Kantor Desa dan Balai Pertemuan/Gedung Serbaguna

Dari rangkaian kegiatan pembangunan di 9 (Sembilan) desa di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Desa (DD) terlihat jelas bahwa tidak ada satupun kegiatan pembangunan yang diselenggarakan untuk Pembangunan/Renovasi Balai Desa.

### IMPLIKASI

Implikasi yang terjadi sebagai akibat/resiko yang ditimbulkan dari ketidak harmonisan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 adalah diantara 74.957 desa yang berada di Indonesia, masih terdapat kurang lebih 10.000 Desa yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya desa-desa yang tersebut di luar pulau jawa belum memiliki Kantor/Balai Desa, sehingga proses pembangunan bisa tersendat sebagai akibat tidak bisa terselenggaranya program pembangunan balai desa atau kantor desa.

Dari 10 desa yang dijadikan obyek penelitian, terdapat 3 (tiga) macam perbedaan desa yaitu :

**TABEL 3**

**Nama desa dan kategori desa**

No	Nama Desa	Kategori
1	Desa Donowarih	1,2
2	Desa Tawangargo	1,2
3	Desa Ngijo	1,2
4	Desa Girimoyo	1,3

5	Desa Ampeldento	1,2
6	Desa Bocek	1,3
7	Desa Tegalgondo	1,2
8	Desa Kepuharjo	1,2,3
9	Desa Ngenep	1,3
10	Desa Sudimoro	1,3

Keterangan :

1. Memiliki Kantor Desa
2. Memiliki Balai Desa
3. Memiliki Gedung Serba Guna/ Balai Pertemuan

#### **Formula Ideal Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20/2018 dengan Permendes PDTT**

**No. 16/2018 yaitu :**

1. Regulasi pengelolaan keuangan desa, khususnya Dana Desa diberikan kepada salah satu kementerian saja, idealnya kementerian desa PDTT yang memiliki kewenangan untuk mengaturnya;
2. Kementerian Dalam Negeri mengatur dalam penyelenggaraan tata pemerintahannya saja;
3. Dalam Permendes PDTT ditegaskan terdapat dalam salah satu pasalnya dengan diperbolehkannya Pembangunan/Renovasi Balai Desa/Kantor Desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Dalam hal belanja bidang pembangunan khususnya untuk belanja Pembangunan Kantor/Balai Desa menurut Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 masih tidak diperbolehkan bersumber dari Dana Desa (DD);

Masih terjadi tumpang tindih aturan perundang-undangan, antara Peraturan Menteri Dalam Negeri 20/2018 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 16/2018;

Tidak ada satupun desa dari 9 (Sembilan) desa yang menyelenggarakan belanja Dana Desa (DD) untuk pembangunan/renovasi balai desa.

### **SARAN**

1. Terbitkan Permendes PDTT yang peruntukan belanja Dana Desa (DD) bisa diperuntukkan untuk belanja Pembangunan Kantor/Balai Desa agar tidak terjadi lagi adanya Pemerintah Desa yang belum memiliki Kantor/Balai Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri diterbitkan untuk tata cara pemerintahan saja, sementara peraturan menteri Desa PDTT diterbitkan untuk Prioritas Penggunaan Dana Desa;
3. Apabila peraturan menteri dalam negeri dan Peraturan Menteri Desa PDTT sudah diberikan kewenangan masing-masing, maka akan terjadi keharmonisan peraturan menteri

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan  
Keuangan Desa;

Peraturan Menteri PDTT Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Peraturan Desa (Perdes) Nomor 6 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Perubahan (APBDESA-P) Desa Donowarih Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Desa (Perdes) Nomor 10 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Perubahan (APBDESA-P) Desa Kepuharjo Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Desa (Perdes) Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa (APBDESA) Desa Ngijo Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Desa (Perdes) Nomor 4 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa (APBDESA) Desa Girimoyo Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Desa (Perdes) Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa (APBDESA) Desa Ngenep Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Desa (Perdes) Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa (APBDESA) Desa Ngenep Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Desa (Perdes) Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa (APBDESA) Desa Bocek Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa (APBDESA) Desa Ampeldento Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa (APBDESA) Desa Tegalgondo Tahun Anggaran 2019;



Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDESA) Desa Sudimoro Tahun Anggaran 2019;

Inten Meutia Liliana , ***Pengelolaan Keuangan Dana Desa***, Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya

Negara, Bukit Lama, Ilir Bar, I, Palembang 30139.

Lina Nasehatun Lina Nasehatun Nafidah<sup>1</sup>, Nur Anisa<sup>21,2</sup>, ***Akuntabilitas Pengelolaan***

***Keuangan Desa di Kabupaten Jombang***, STIE PGRI Dewantara Jombang

Hasniati, ***Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa***, Departemen Ilmu Administrasi,

Universitas Hasanuddin [hasniati@unhas.ac.id](mailto:hasniati@unhas.ac.id)

Tegar Firmandani, ***Tinjauan Yuridis Kedudukan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-***

***Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa***, [Tegarfirmandani@Gmail.Com](mailto:Tegarfirmandani@Gmail.Com)–Tlpn

085272657037

